

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Kinerja pemerintahan daerah kota/kabupaten di Propinsi Jawa Timur selama tahun 2005-2007 mengalami peningkatan, baik dari segi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Peningkatan ini berarti otonomi daerah dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi Jawa Timur.
- b. Peningkatan kinerja yang terjadi juga berdampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada kota/kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Peningkatan kesejahteraan ini dapat dilihat dari peningkatan IPM selama kurun waktu 2005-2007.
- c. Hasil pengujian secara langsung antara kinerja keuangan terhadap IPM menunjukkan derajat desentralisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja, rasio keserasian belanja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.
- d. Derajat desentralisasi berpengaruh diakibatkan karena pendapatan yang ada merefleksikan pembangunan manusia yang ada pada kota/kabupaten di Jawa timur. Sedangkan pada sisi

belanja tidak berpengaruh terhadap IPM dikarenakan kemungkinan pemerintah selama ini hanya berfokus pada bagaimana menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan *outcome* yang ada, sehingga kesejahteraan belum bisa tercapai secara maksimal.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang dijelaskan diatas, maka keterbatasan penelitian ini adalah:

- a. Variabel-variabel kinerja keuangan yang digunakan pada penelitian ini hanya beberapa saja, masih ada variabel-variabel lain yang terkait dengan IPM.
- b. Penelitian ini berfokus pada pendapatan dan belanja secara keseluruhan bukan berdasarkan subsektornya.
- c. Objek penelitian hanya berfokus pada Jawa timur.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya perlu melihat pendapatan dan belanja daerah berdasarkan subsektor. Selain itu, juga memperluas obyek penelitian tidak hanya pada kota/kabupaten di Propinsi Jawa Timur tetapi juga kota/kabupaten di Propinsi lain di Indonesia.
- b. Pemerintah sebaiknya memperhatikan pengalokasian belanja sesuai dengan *outcome* yang hendak dicapai, tidak hanya semata-

mata untuk menghabiskan belanja. Hal ini dilakukan agar tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, 2007, Relevansi Kemampuan Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi dalam Era Otonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali), *1st National Accounting Conference*, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Barata, Atep Adya, dan Bambang Trihartanto, 2004, *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ekaristi, Puspa Dewi dan Priyo Hari Adi. 2008. Fenomena *Ilusi Fiskal* dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Tengah). *2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop*. Depok.
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, Ardi, 2007, Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran (Studi pada APBN 1999 – 2006) , *Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama*.
- Mahmudi, 2007, *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Permoni, Lyta, 2009, Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Setelah Otonomi Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia, *Skripsi Mahasiswa Fakultas*

Ekonomi Universitas Widya Mandala Surabaya tidak dipublikasikan.

Pengukuran Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial dalam Rangka LKPJ, 2009, Jawa Timur: Bappeda.

Presiden Republik Indonesia, 2000^a, Undang – Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

_____, 2000^b, Undang – Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

_____, 2004^a, Undang – Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

_____, 2004^b, Undang – Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

_____, 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.

_____, 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Susilo, Gideon Tri Budi dan Priyo Hari Adi, 2007, Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi (Studi empiris di Propinsi Jawa Tengah). *Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama Surabaya 25-26 April 2007.*